



ANALISIS KRITIS TERHADAP EKSISTENSI PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN PENYULUHAN ISLAM

CRITICAL ANALYSIS OF THE EXISTENCE OF THE ISLAMIC GUIDANCE AND COUNSELING STUDY PROGRAM

Nasichah¹*, Study Rizal L. Kontu²

^{1,2} UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

E-mail: nasichah@uinjkt.ac.id

Abstrak – Artikel ini membahas secara kritis eksistensi Program Studi Bimbingan dan Penyuluhan Islam (BPI) di tengah dinamika pendidikan tinggi Islam kontemporer. Transformasi IAIN menjadi UIN, perkembangan ilmu konseling modern, serta perubahan sosial masyarakat menimbulkan tantangan baru bagi kejelasan identitas keilmuan BPI. Artikel ini menegaskan bahwa eksistensi BPI bukan sekadar persoalan nomenklatur, tetapi terkait legitimasi akademik, relevansi sosial, dan posisi strategis dalam kebijakan pendidikan tinggi. Melalui kajian pustaka dan analisis kritis-reflektif, artikel ini mengusulkan empat agenda strategis: meneguhkan epistemologi dakwah profetik, mereformulasi kurikulum integratif dan kontekstual, memperkuat kompetensi lulusan yang profetik, dan melakukan reposisi kelembagaan. Dilengkapi data terbaru akreditasi nasional dan internasional BPI FDIKOM UIN Jakarta, artikel ini menunjukkan bahwa Prodi BPI memiliki peluang besar untuk tetap eksis sebagai ilmu dakwah yang transformatif, kontekstual, dan relevan di era Revolusi Industri 5.0.

Kata Kunci: Eksistensi BPI, Dakwah Profetik, Kurikulum Integratif, Kompetensi Lulusan, Kebijakan Pendidikan Tinggi Islam

Abstract – This article critically discusses the existence of the Islamic Guidance and Counseling Study Program (BPI) amid the dynamics of contemporary Islamic higher education. The transformation of IAIN into UIN, the rise of modern counseling sciences, and shifting social realities have created new challenges for BPI's academic identity and relevance. The article asserts that BPI's existence is not merely a matter of nomenclature but relates to academic legitimacy, social relevance, and its strategic position within higher education policy. Using a literature review and critical-reflective analysis, this paper proposes four strategic agendas: affirming a prophetic dakwah epistemology, reformulating an integrative and contextual curriculum, strengthening prophetic graduate competencies, and repositioning institutional roles. With the addition of recent data on BPI FDIKOM UIN Jakarta's national and international accreditations, the article argues that BPI has great potential to remain relevant and transformative in the era of the Fifth Industrial Revolution.

Keywords: BPI Existence, Prophetic Dakwah, Integrative Curriculum, Graduate Competencies, Islamic Higher Education Policy

PENDAHULUAN

Naskah Setiap ilmu pengetahuan lahir dari sejarah dan pergulatan zaman. Demikian pula Program Studi Bimbingan dan Penyuluhan Islam (BPI), yang berdiri di Fakultas Dakwah di lingkungan IAIN dan kini UIN di Indonesia. Sejak awal, Prodi BPI dirancang bukan hanya untuk mengajarkan dakwah verbal, tetapi untuk melahirkan kader pendamping umat yang mampu membimbing, mengarahkan, dan mencerdaskan masyarakat secara sosial dan spiritual. Namun, Prodi BPI kini menghadapi berbagai tantangan serius. Transformasi IAIN menjadi UIN menuntut fakultas dakwah semakin profesional, terukur, dan responsif terhadap pasar kerja. Pada saat bersamaan, Prodi BPI dihadapkan pada dilema antara mempertahankan jati dirinya sebagai ilmu dakwah transformatif atau beradaptasi menjadi ilmu konseling modern yang dianggap lebih profesional dan “marketable.”

Isu paling krusial muncul dalam perdebatan antara mempertahankan nama “Bimbingan dan Penyuluhan Islam” atau mengubahnya menjadi “Bimbingan Konseling Islam”. Banyak pihak menilai kata “konseling” lebih profesional dan lebih dikenal masyarakat, sedangkan istilah “penyuluhan” dianggap klasik, kurang “menjual,” dan terdengar ketinggalan zaman. Namun, persoalan sesungguhnya bukan hanya soal nama. Di balik perdebatan nomenklatur, tersembunyi persoalan eksistensi keilmuan: apakah BPI masih relevan sebagai ilmu dakwah yang mengintegrasikan nilai-nilai transenden dengan pendekatan sosial dan psikologis? Ataukah BPI hanya menjadi duplikasi ilmu konseling Barat yang diberi label Islam?

Dalam konteks inilah artikel ini hadir. Penulis meyakini bahwa Prodi BPI memiliki kekayaan epistemologis yang berakar pada dakwah profetik sebagaimana dirumuskan Kuntowijoyo (2006), yaitu ilmu yang tidak hanya menjelaskan realitas, tetapi juga berfungsi mengubahnya menjadi lebih manusiawi, adil, dan transenden. Namun kekayaan ini tidak akan bermakna jika tidak dikelola melalui kurikulum yang relevan, kompetensi lulusan yang unggul, dan posisi kelembagaan yang strategis di tengah peta keilmuan PTKIN.

METODOLOGI

Artikel ini disusun melalui kajian pustaka (*library research*) dan pendekatan analisis kritis-reflektif. Data bersumber dari literatur keislaman, jurnal akademik, dokumen kebijakan pendidikan tinggi Islam, laporan aktivitas Prodi BPI, serta dokumen akreditasi nasional dan internasional. Analisis dilakukan untuk mengidentifikasi persoalan mendasar, mengkaji teori dan kebijakan, serta merumuskan agenda strategis untuk memperkuat eksistensi Prodi BPI.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Eksistensi Akademik

Eksistensi akademik Prodi Bimbingan dan Penyuluhan Islam (BPI) di Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sesungguhnya memiliki akar sejarah yang sangat kuat. Prodi ini didirikan bukan sekadar untuk menghasilkan

lulusan yang mahir berbicara di mimbar, melainkan untuk melahirkan kader dakwah yang mampu membaca realitas sosial dan mendampingi masyarakat menghadapi problematika kehidupan. Inilah yang menjadikan BPI istimewa dibanding prodi lainnya: ia tidak hanya berorientasi pada transfer pengetahuan agama, tetapi juga pada transformasi sosial.

Sejak dekade 1980-an hingga awal 2000-an, Prodi BPI selalu menjadi prodi favorit. Banyak mahasiswa memilih BPI karena tertarik dengan kiprah alumni yang berkontribusi besar di lapangan. Mereka menjadi penyuluhan agama di KUA, pendamping narapidana di lembaga pemasyarakatan, konsultan rohani di rumah sakit, hingga fasilitator program-program pemberdayaan sosial berbasis nilai keislaman. Alumni BPI dikenal tidak hanya berbekal wawasan keagamaan, tetapi juga kemampuan komunikasi sosial, empati, dan kepekaan terhadap dinamika masyarakat. Namun kini, Prodi BPI menghadapi tekanan hebat. Transformasi IAIN menjadi UIN membawa paradigma baru yang lebih profesional, terukur, dan sangat kompetitif. Prodi keagamaan dituntut untuk lebih “marketable”, sedangkan istilah “penyuluhan” dinilai tidak sepopuler istilah “konseling.” Akibatnya, muncul kecenderungan di berbagai PTKIN untuk menggeser nomenklatur BPI menjadi Bimbingan Konseling Islam (BKI) demi mengejar daya tarik pasar dan legitimasi profesi.

Ironisnya, langkah pragmatis ini justru melahirkan kebingungan identitas. Banyak mahasiswa dan bahkan dosen menganggap lulusan BPI otomatis bisa menjadi konselor profesional. Padahal, menurut Permendiknas No. 27 Tahun 2008, profesi konselor hanya dapat diraih setelah mengikuti pendidikan profesi khusus pasca-S1. Ini menyebabkan banyak alumni BPI terjebak dalam “harapan kosong”, karena gelar S.Sos. mereka tidak diakui untuk menjadi konselor profesional, apalagi guru BK. Persoalan semakin pelik ketika realitas kebijakan negara juga belum berpihak sepenuhnya pada Prodi BPI. Ketika pemerintah membuka seleksi CPNS besar-besaran, formasi tenaga penyuluhan di berbagai kementerian seperti BKKBN, BNN, atau Kemenkumham mensyaratkan lulusan S1 Ilmu Sosial. Namun, Surat Dirjen Belmawa Ditjen Dikti No. 2293/E3/2014 menegaskan bahwa Prodi BPI tidak termasuk rumpun ilmu sosial. Akibatnya, alumni BPI sering tersisih karena tidak dianggap relevan secara nomenklatur rumpun ilmu.

Lebih membingungkan lagi, Kementerian Agama selaku institusi yang melahirkan Prodi BPI justru membuka formasi penyuluhan agama Islam tanpa memprioritaskan lulusan BPI. Semua lulusan prodi apa pun di PTKIN boleh mendaftar, sehingga alumni BPI kehilangan posisi strategis yang seharusnya menjadi hak istimewa mereka. Inilah paradoks besar yang membuat eksistensi akademik Prodi BPI seolah melayang-layang tanpa pijakan yang kokoh. Namun, di tengah semua tantangan itu, Prodi BPI FDIKOM UIN Jakarta justru mencatat sejarah penting. Prodi ini berhasil meraih Akreditasi Unggul BAN-PT (SK No. 249/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/II/2025), serta akreditasi internasional ACQUIN (2025) dan sebelumnya AUN-QA (2016-2020). Pengakuan ini menjadi bukti bahwa Prodi BPI memiliki kualitas akademik yang diakui nasional dan internasional. Namun, capaian akreditasi saja tidak cukup. Ia harus diikuti



dengan keberanian mendefinisikan jati diri akademik BPI sebagai ilmu dakwah transformatif yang membedakannya secara tegas dari Prodi BKI maupun psikologi Islam.

Eksistensi akademik Prodi BPI harus dibangun tidak hanya melalui akreditasi, tetapi juga melalui: Pertama, produksi karya ilmiah yang khas BPI, seperti riset dakwah berbasis penyuluhan komunitas, konseling spiritual, atau intervensi sosial di masyarakat marginal. Kedua, forum akademik yang mengangkat tema distingsi BPI sebagai ilmu dakwah. Ketiga, publikasi di jurnal terakreditasi untuk mengokohkan posisi BPI sebagai ilmu sosial keagamaan yang unik. Jika langkah-langkah ini tidak segera dilakukan, Prodi BPI terancam menjadi prodi administratif yang hanya hidup dalam dokumen SK Rektor — tanpa pengaruh signifikan dalam peta keilmuan Islam.

Eksistensi Kurikulum dan Epistemologi

Eksistensi kurikulum dan epistemologi Prodi BPI adalah titik paling krusial yang menentukan masa depan prodi ini. Kurikulum bukan sekadar daftar mata kuliah. Ia adalah cermin filosofi ilmu, orientasi metodologi, dan arah kompetensi lulusan. Inilah medan paling strategis untuk menegaskan identitas akademik Prodi BPI. Saat ini, banyak Prodi BPI di Indonesia terjebak pada kurikulum yang “mendua”. Di satu sisi, mereka mengaku sebagai Prodi dakwah, tetapi di sisi lain 60-70% mata kuliah diisi dengan materi konseling yang diadopsi langsung dari psikologi Barat. Mata kuliah seperti Teori Konseling, Teknik Konseling Individu, Terapi Perilaku Kognitif, hingga Gestalt Therapy diajarkan hampir persis seperti di Fakultas Psikologi atau Prodi BK di Fakultas Tarbiyah. Bedanya hanya ditambahkan ayat Al-Qur'an atau hadis di awal materi. Inilah yang disebut pseudo-Islamisasi: label Islam ada, tetapi esensi epistemologinya hilang.

Padahal, penyuluhan dalam Islam memiliki ruh dakwah yang sangat khas. Ahmad Jainuri (2013) menjelaskan bahwa penyuluhan Islam tidak hanya bertujuan menyelesaikan masalah individu, tetapi juga membangun kesadaran sosial umat. Ia bersifat kolektif, transformatif, dan menekankan pembebasan masyarakat dari belenggu sosial, psikologis, dan spiritual. Penyuluhan adalah dakwah dalam bentuk yang lebih praktis, lebih edukatif, dan lebih kontekstual. Hal ini sejalan dengan pemikiran Kuntowijoyo (2006) tentang ilmu sosial profetik, yang memandang ilmu bukan hanya untuk menjelaskan realitas, tetapi juga untuk mengubahnya ke arah yang lebih adil, manusiawi, dan transenden. Prodi BPI semestinya menegaskan epistemologi dakwah profetik ini, sehingga berbeda secara mendasar dari prodi lain. Namun, masalahnya, Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) Prodi BPI sering terlalu kabur. Banyak CPL hanya berbunyi: “Lulusan mampu melakukan bimbingan dan konseling Islam”. Tetapi tidak dijelaskan:

- Bimbingan Islam seperti apa?
- Apakah hanya personal?
- Apakah mencakup dakwah sosial?
- Bagaimana integrasi dakwah profetik dengan teori konseling modern?

Padahal, CPL BPI harus berani berbeda. Misalnya: “Lulusan mampu mengidentifikasi masalah sosial umat dan merancang program penyuluhan berbasis nilai-nilai dakwah transformatif”. “Lulusan mampu melakukan konseling spiritual yang tidak hanya memulihkan psikologi individu, tetapi juga membangkitkan kesadaran sosial”.

Selain CPL, Prodi BPI harus memiliki mata kuliah khas seperti:

- Dakwah Komunitas dan Analisis Sosial
- Psikologi Dakwah
- Penyuluhan Islam di Lapas
- Dakwah Keluarga
- Penyuluhan Islam Berbasis Digital
- Metodologi Riset Dakwah Transformatif

Tanpa mata kuliah khas ini, Prodi BPI akan kehilangan identitasnya. Ia hanya menjadi prodi “bayangan” Prodi BKI atau Psikologi Islam. Inilah bahaya besar bagi eksistensi epistemologis BPI. Lebih jauh, Prodi BPI juga harus berani mendekonstruksi teori Barat. Misalnya, bagaimana konsep self-actualization Abraham Maslow dibaca ulang dalam perspektif Islam? Apakah aktualisasi diri hanya sekadar memenuhi potensi personal, ataukah menjadi makhluk sosial yang membawa kemaslahatan? Kurikulum BPI juga harus menjawab tantangan dunia digital. Penyuluhan dakwah kini tidak cukup dengan metode konvensional. Mahasiswa BPI harus dibekali keterampilan membuat konten dakwah digital, podcast, video edukasi, hingga konseling online. Jika tidak, Prodi BPI akan ditinggalkan generasi milenial dan Z yang lebih dekat dengan dunia digital. Terakhir, bahasa pengajaran pun perlu direformasi. Banyak mahasiswa mengeluh materi dakwah masih terlalu teoretis, terlalu “kitab kuning,” dan kurang membumi. Prodi BPI harus mengajarkan bahasa komunikasi publik yang segar, populer, tetapi tetap substansial.

Eksistensi kurikulum dan epistemologi Prodi BPI hanya akan terjaga jika:

- Dosen berani melakukan inovasi kurikulum.
- Buku ajar khas BPI ditulis.
- Riset dakwah transformatif digalakkan.

Jika tidak, Prodi BPI akan terus berada dalam posisi abu-abu: terlalu agama untuk diakui sebagai konseling profesional, terlalu psikologi untuk disebut dakwah. Itulah ancaman terbesar bagi eksistensi BPI ke depan.

Eksistensi Sosial

Eksistensi sosial Prodi Bimbingan dan Penyuluhan Islam (BPI) merupakan refleksi paling nyata dari sejauh mana ilmu yang dikembangkan di kampus betul-betul hidup di tengah masyarakat. Inilah esensi ilmu dakwah: bukan hanya menjadi wacana akademik, tetapi hadir sebagai kekuatan sosial yang membimbing, membina, dan membebaskan umat dari berbagai problematika kehidupan. Dalam sejarahnya, Prodi BPI memiliki rekam jejak sosial yang luar biasa. Para alumninya menjadi ujung tombak penyuluhan agama yang menyentuh akar kehidupan masyarakat. Mereka hadir di banyak ruang sosial:



- Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) → alumni BPI mendampingi para narapidana mencari makna hidup, membangun keimanan, dan mempersiapkan reintegrasi sosial setelah bebas.
- Rumah sakit → alumni BPI memberikan layanan bimbingan rohani kepada pasien yang tengah menghadapi trauma, penyakit kronis, bahkan menjelang akhir hayat.
- KUA dan keluarga sakinah → alumni BPI terlibat dalam penyuluhan pranikah, pembinaan keluarga muda, serta penanganan konflik rumah tangga seperti KDRT.
- Program pemberdayaan sosial → alumni BPI menjadi penyuluhan narkoba, pendamping korban trafficking, hingga fasilitator program kesehatan reproduksi berbasis nilai-nilai Islam.

Ini menunjukkan Prodi BPI tidak hanya mencetak penceramah di mimbar, tetapi juga pendamping sosial yang langsung bersentuhan dengan problem masyarakat. Inilah eksistensi sosial BPI yang patut dibanggakan. Namun, memasuki era digital dan urbanisasi, tantangan sosial yang dihadapi BPI jauh lebih kompleks. Dunia berubah dengan cepat:

- Fenomena mental health crisis → munculnya kasus-kasus depresi, anxiety disorder, self-harm, bahkan bunuh diri, termasuk di kalangan remaja Muslim.
- Dunia digital → memunculkan ruang publik baru yang penuh tekanan sosial, cyberbullying, hate speech, dan arus informasi tanpa filter.
- Urbanisasi → melahirkan problem sosial seperti kesenjangan ekonomi, kehilangan kohesi sosial, hingga pergeseran nilai-nilai budaya.
- Krisis keluarga → meningkatnya angka perceraian, kekerasan rumah tangga, dan broken home yang berdampak langsung pada kesejahteraan psikososial masyarakat.

Dalam situasi ini, masyarakat kini semakin mengenal profesi psikolog, psikiater, dan konselor profesional. Bahkan, konseling online kini menjamur melalui aplikasi digital, menawarkan layanan cepat, privat, dan dianggap lebih modern. Ketika masyarakat mengalami masalah, mereka cenderung mencari psikolog ketimbang mendatangi penyuluhan agama di KUA. Inilah tantangan serius eksistensi sosial Prodi BPI. Di sisi lain, persepsi sosial terhadap profesi penyuluhan agama masih problematik. Banyak masyarakat menganggap penyuluhan agama hanya hadir kalau ada program pemerintah atau sekadar membaca doa di acara formal. Bahkan muncul kesan bahwa penyuluhan agama hanya pekerjaan sampingan, bukan profesi utama. Padahal, alumni BPI seharusnya memiliki identitas profesional yang sejajar dengan profesi lain seperti psikolog atau konselor.

Problem sosial lainnya adalah ketidaktegasan kebijakan negara. Ketika Kementerian Agama membuka rekrutmen penyuluhan agama Islam, formasi dibuka untuk semua lulusan PTKIN tanpa memprioritaskan alumni BPI. Ini menimbulkan pertanyaan besar: Mengapa Prodi BPI didirikan jika profesi penyuluhan agama tidak diistimewakan untuk alumninya? Mengapa formasi CPNS penyuluhan agama tidak secara spesifik ditujukan untuk lulusan BPI? Hal ini membuat eksistensi sosial Prodi BPI terancam

tergerus oleh profesi lain yang lebih diakui secara hukum dan sosial. Alumni BPI rentan menjadi “profesi tak bernama”, karena di mata masyarakat, konselor diidentikkan dengan psikologi, bukan dakwah.

Tugas besar Prodi BPI ke depan adalah: Pertama, mengembalikan martabat sosial penyuluhan agama Islam sebagai profesi yang profesional, dihormati, dan memiliki distingsi keahlian. Kedua, membekali mahasiswa dengan keterampilan komunikasi digital agar bisa berdakwah di platform online. Ketiga, mengintegrasikan pendekatan psikososial dengan dakwah Islam, agar alumni BPI mampu menangani problem masyarakat modern secara komprehensif. Eksistensi sosial Prodi BPI tidak boleh hanya menjadi nostalgia kejayaan masa lalu. Ia harus dibuktikan di tengah realitas sosial yang makin kompleks. Prodi BPI harus menjadi kekuatan dakwah kontemporer — bukan hanya membimbing umat secara spiritual, tetapi juga membebaskan umat dari krisis sosial modern.

Eksistensi dalam Kebijakan Pendidikan Tinggi Islam

Selain tantangan sosial, Prodi BPI dihadapkan pada medan pertarungan lain yang tak kalah penting: kebijakan pendidikan tinggi Islam. Inilah area yang sering luput dari perhatian, padahal justru sangat menentukan hidup-matinya Prodi BPI. Transformasi IAIN menjadi UIN membawa konsekuensi besar. Banyak UIN membuka Fakultas Ekonomi, Sains, Psikologi, Teknik, bahkan Kedokteran. Ini memang mencerminkan semangat integrasi ilmu. Namun, realitasnya, kehadiran prodi-prodi umum menciptakan persaingan yang sangat keras. Prodi-prodi umum dianggap lebih “pasarable” karena dianggap lebih mudah terserap dunia kerja.

Di banyak PTKIN, jumlah peminat Prodi BPI menurun. Orang tua dan calon mahasiswa kini cenderung bertanya: “Apakah lulusan Prodi BPI mudah dapat kerja?” “Apakah Prodi BPI diakui sebagai profesi nasional?” “Apa bedanya BPI dengan Psikologi Islam atau BKI?” Inilah realitas keras yang membuat Prodi BPI sering tersisih dalam kebijakan kampus. Bahkan, beberapa IAIN mulai mewacanakan penggabungan atau penutupan prodi-prodi keagamaan yang dianggap sepi peminat. Ini bukan sekadar isu spekulatif, melainkan sudah terjadi di beberapa kampus, di mana prodi keagamaan tidak lagi membuka penerimaan mahasiswa baru karena kuota tidak terpenuhi.

Lebih serius lagi, standar akreditasi nasional kini semakin tinggi. LAMDIK atau BAN-PT tidak hanya menilai dokumen administrasi, tetapi juga: distingsi keilmuan; keterkaitan lulusan dengan kebutuhan masyarakat; kinerja riset dosen; kerjasama internasional. Dalam kondisi ini, Prodi BPI harus mampu membuktikan bahwa ia punya keunikan ilmu yang tidak tergantikan oleh prodi lain. Jika tidak, Prodi BPI berpotensi dianggap tidak relevan dan tidak *marketable*. Namun, Prodi BPI FDIKOM UIN Jakarta memberikan harapan besar. Prodi ini berhasil meraih:

- Akreditasi Unggul BAN-PT (SK No. 249/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/II/2025)
- Akreditasi internasional ACQUIN (2025)
- Akreditasi AUN-QA (2016-2020)



Ini membuktikan bahwa Prodi BPI mampu bersaing di tingkat nasional dan internasional. Capaian ini seharusnya dijadikan modal besar untuk: Pertama, mengokohkan posisi BPI sebagai prodi ilmu dakwah yang unik. Kedua, membangun kemitraan kelembagaan dengan Kemenag, Kemenkumham, BKKBN, LPSK, lembaga sosial, hingga NGO internasional. Ketiga, menghasilkan riset unggulan yang relevan dengan isu sosial kontemporer seperti dakwah digital, konseling trauma, atau pemberdayaan masyarakat rentan. Keempat, membangun branding BPI sebagai prodi yang profesional, modern, tetapi tetap berakar pada nilai dakwah profetik. Namun, kebijakan pemerintah juga masih menyisakan persoalan besar. Saat Kementerian Agama membuka formasi penyuluhan agama, tidak ada keistimewaan untuk alumni Prodi BPI. Semua lulusan PTKIN boleh melamar. Ini menimbulkan tanda tanya besar: Mengapa Kemenag tidak memprioritaskan Prodi BPI sebagai prodi yang memang didirikan untuk mencetak penyuluhan agama? Apa gunanya Prodi BPI jika posisi alumni tidak diistimewakan dalam kebijakan rekrutmen negara?

Inilah anomali kebijakan yang harus segera diatasi. Kalau tidak, Prodi BPI hanya akan menjadi prodi yang hidup di atas kertas, tetapi terpinggirkan dalam kebijakan negara. Eksistensi Prodi BPI dalam kebijakan pendidikan tinggi Islam harus diperkuat dengan:

- Menegaskan bahwa BPI bukan sekadar psikologi Islami, tetapi ilmu dakwah profetik.
- Mendokumentasikan praktik terbaik penyuluhan Islam** di berbagai daerah agar menjadi portofolio kebijakan nasional.
- Terlibat aktif di forum nasional dan internasional, seperti LAMDIK, AUN-QA, ACQUIN, ASPIKOM, dan asosiasi profesi konseling.
- Mendesak Kemenag agar membuka formasi penyuluhan agama khusus untuk alumni BPI.

Eksistensi BPI dalam kebijakan pendidikan tinggi Islam bukan sekadar soal administrasi. Ini adalah soal identitas, paradigma, dan masa depan. Jika Prodi BPI hanya pasif, ia akan tersingkir oleh prodi lain yang lebih agresif. Namun jika Prodi BPI mampu mendefinisikan ulang eksistensinya, ia tidak hanya akan bertahan, tetapi akan menjadi pilar penting ilmu dakwah kontemporer yang kontekstual dan transformatif.

Empat Agenda Strategis Memperkuat Eksistensi Prodi BPI

Eksistensi Prodi Bimbingan dan Penyuluhan Islam (BPI) tidak mungkin bertahan hanya dengan nostalgia historis atau kebanggaan akreditasi. Ia harus diwujudkan dalam langkah-langkah strategis yang konkret. Inilah yang menjadi “jembatan” antara idealisme dan realitas, antara gagasan dakwah profetik dan tuntutan dunia pendidikan tinggi yang kian kompetitif. Empat agenda strategis yang ditawarkan bukan sekadar wacana. Ia adalah roadmap nyata agar Prodi BPI tidak hanya eksis, tetapi benar-benar memiliki distingsi keilmuan dan relevansi sosial yang membedakannya dari prodi lain. Mari kita uraikan keempatnya secara lebih komprehensif:

1. Meneguhkan Epistemologi Dakwah Profetik

Inilah fondasi paling mendasar. Tanpa epistemologi yang jelas, Prodi BPI akan selalu rapuh diterpa arus globalisasi keilmuan. Dakwah profetik adalah dakwah yang tidak hanya menyampaikan ajaran agama secara normatif, tetapi memiliki tujuan besar: humanisasi (memanusiakan manusia), liberasi (membebaskan manusia dari penindasan), dan transendensi (menghubungkan manusia kepada Tuhan). Konsep ini dikembangkan oleh Kuntowijoyo (2006) dalam gagasan ilmu sosial profetik. Saat ini, Prodi BPI terlalu banyak mengadopsi teori konseling Barat seperti Carl Rogers (client-centered therapy), Albert Ellis (REBT), atau Gerard Egan (Skilled Helper Model). Padahal, teori-teori ini lahir dari worldview sekuler yang memandang manusia hanya sebagai makhluk psikologis, bukan makhluk spiritual.

Prodi BPI harus berani mendobrak ini. Meneguhkan epistemologi dakwah profetik berarti:

- Mengembangkan teori konseling berbasis Al-Qur'an dan Hadis. Misalnya, bagaimana konsep sabar, ikhlas, tawakal, husnuzan, qanaah tidak hanya diajarkan sebagai nilai moral, tetapi sebagai *coping mechanism* dalam menghadapi tekanan psikologis dan sosial.
- Dekonstruksi teori Barat. Misalnya: Apakah self-actualization Abraham Maslow sekadar pemenuhan potensi diri? Atau dalam Islam, self-actualization justru mencapai puncak pengabdian sosial dan kehambaan kepada Allah?
- Metodologi dakwah integratif. Dakwah bukan hanya ceramah, melainkan dakwah dialogis, konseling spiritual, dan intervensi sosial berbasis riset.

Tanpa epistemologi dakwah profetik, Prodi BPI akan kehilangan keunikan. Ia hanya akan menjadi "konseling Islami" dalam nama, tetapi tidak dalam ruh.

2. Mereformulasi Kurikulum Integratif dan Kontekstual

Kurikulum adalah jantung eksistensi Prodi BPI. Jika kurikulum hanya menyalin dari Prodi BKI atau Psikologi Islam, maka BPI akan hilang identitasnya. Prodi BPI harus berani berbeda. Kurikulum BPI seharusnya tidak hanya berisi teori konseling individual, tetapi menekankan penyuluhan berbasis komunitas, pemberdayaan sosial, dan dakwah transformatif. Mata kuliah khas yang harus masuk kurikulum Prodi BPI:

- Dakwah Komunitas dan Analisis Sosial → mengajarkan mahasiswa membaca masalah sosial urbanisasi, radikalisme, hingga digitalisasi, lalu merumuskan strategi penyuluhan dakwah berbasis data.
- Psikologi Dakwah → integrasi ilmu psikologi dengan perspektif dakwah. Contoh, bagaimana mendampingi korban kekerasan rumah tangga bukan hanya dengan terapi psikologis, tetapi juga dengan pendekatan spiritual dan sosial.
- Teknologi Dakwah Digital → mahasiswa diajarkan membuat konten edukasi dakwah, podcast, video edukasi, hingga platform konseling online.
- Penyuluhan Islam Berbasis Evidence-Based Practice → mahasiswa diajarkan riset tindakan (action research) untuk memastikan setiap intervensi dakwah berbasis data, bukan asumsi semata.



Lebih jauh, kurikulum Prodi BPI harus menggunakan bahasa yang kontekstual. Banyak mahasiswa mengeluh materi dakwah masih terlalu “kitab kuning,” terlalu abstrak, dan tidak membumi. Prodi BPI harus mengajarkan: (1) Bahasa komunikasi publik yang segar. (2) Teknik storytelling digital. (3) Kemampuan mempresentasikan ide dakwah dalam forum profesional. Tanpa reformasi kurikulum, Prodi BPI akan terus berada di zona abu-abu: terlalu agama untuk diakui sebagai konseling profesional, terlalu psikologi untuk disebut ilmu dakwah.

3. Memperkuat Kompetensi Profetik Lulusan

Lulusan adalah “wajah” Prodi BPI di mata masyarakat. Jika lulusan Prodi BPI tidak memiliki keahlian yang unik, prodi ini akan dianggap tidak memiliki keunggulan. Kompetensi lulusan BPI harus multidimensional. Tidak cukup hanya piawai ceramah atau hafal ayat. Lulusan Prodi BPI harus memiliki kompetensi:

- *Spiritual competence* → mampu menjadi pembimbing spiritual, bukan hanya hafal dalil, tetapi mampu menafsirkan ayat secara kontekstual.
- *Psychosocial competence* → mampu mendampingi individu atau komunitas menghadapi masalah psikologis atau sosial. Contoh, lulusan BPI harus bisa melakukan crisis intervention saat terjadi bencana alam atau konflik sosial.
- *Social transformation competence* → mampu membaca realitas sosial, mendesain program penyuluhan berbasis riset, memimpin aksi sosial.
- *Digital literacy competence* → mampu menggunakan media sosial, membuat konten dakwah digital, hingga melayani konseling online.

Lebih jauh, kompetensi lulusan BPI harus berparadigma profetik. Artinya, lulusan bukan hanya menyelesaikan masalah individu, tetapi juga mengembangkan misi perubahan sosial. Sebagaimana diingatkan Kuntowijoyo, ilmu yang tidak berpihak pada humanisasi, liberasi, dan transendensi hanyalah pengetahuan kosong. Selain kompetensi, Prodi BPI harus:

- Membantu lulusan memperoleh sertifikasi profesional. Contoh, kerjasama dengan BNSP untuk skema sertifikasi profesi penyuluhan dakwah atau konselor spiritual Islami.
- Membekali lulusan dengan soft skills → public speaking, desain komunikasi visual, manajemen program sosial.
- Mendorong magang di lembaga sosial → lapas, rumah sakit, NGO, KUA, atau lembaga penyuluhan berbasis digital.

Tanpa kompetensi yang khas, lulusan BPI akan terjebak menjadi “sarjana dakwah tanpa medan”. Inilah taruhan besar Prodi BPI.

4. Melakukan Reposisi Kelembagaan

Reposisi kelembagaan adalah agenda paling strategis tetapi sering terlupakan. Prodi BPI tidak cukup hanya memiliki epistemologi kuat, kurikulum bagus, atau lulusan hebat. Ia juga harus memiliki posisi strategis dalam peta keilmuan PTKIN dan kebijakan nasional.

Reposisi kelembagaan Prodi BPI harus meliputi: Menegaskan distingsi keilmuan di internal PTKIN. Prodi BPI harus berani menyuarakan bahwa: BPI bukan sekadar prodi konseling. BPI adalah ilmu dakwah yang unik, memadukan spiritualitas, psikologi, dan transformasi sosial. Aktif hadir di forum nasional dan internasional.

- ASPIKOM → forum ilmu komunikasi.
- APSI → Asosiasi Psikologi Islam.
- Asosiasi Konselor Indonesia → menjalin kerjasama dan advokasi.
- AUN-QA, ACQUIN → forum akreditasi internasional.

Menghasilkan riset unggulan. Prodi BPI harus melahirkan riset-riset yang menjadi rujukan nasional, misalnya:

- Penyuluhan Islam berbasis digital.
- Trauma healing pasca bencana.
- Metode dakwah di lembaga pemasyarakatan.

Membangun kemitraan kelembagaan. Prodi BPI harus menjalin kerjasama dengan:

- Kemenag → bidang penyuluhan keluarga sakinah, deradikalisasi, penyuluhan narkoba.
- Kemenkumham → pembinaan napi.
- BKKBN → penyuluhan kependudukan dan keluarga.
- LPSK → pendampingan korban kekerasan.
- NGO internasional → program peace-building, pemberdayaan perempuan.

Membangun branding Prodi BPI. Banyak masyarakat bahkan mahasiswa tidak tahu apa beda BPI dan BKI. Prodi BPI harus:

- Aktif membuat publikasi ilmiah.
- Mengelola media sosial prodi.
- Membuat podcast, webinar, infografis tentang keunikan BPI.

Reposisi kelembagaan akan mengubah citra BPI dari prodi “pinggiran” menjadi pilar utama ilmu dakwah kontemporer. Tanpa reposisi, Prodi BPI hanya akan bertahan di atas kertas. Dengan reposisi, Prodi BPI akan menginspirasi dunia. Keempat agenda strategis ini saling terkait. Meneguhkan epistemologi dakwah profetik adalah fondasi keilmuan. Reformulasi kurikulum adalah wujud implementasi nilai-nilai profetik. Memperkuat kompetensi lulusan adalah cara mewujudkan distingsi BPI di lapangan. Sementara reposisi kelembagaan adalah kunci agar Prodi BPI tetap eksis di panggung nasional dan global. Tanpa keempat agenda ini, Prodi BPI hanya akan menjadi nama dalam SK Rektor. Dengan keempat agenda ini, Prodi BPI akan benar-benar bermakna — membimbing umat, membebaskan masyarakat, dan membangun peradaban.

KESIMPULAN DAN SARAN

Prodi Bimbingan dan Penyuluhan Islam (BPI) bukan sekadar entitas administratif yang tercatat dalam struktur Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif



Hidayatullah Jakarta. Ia adalah warisan intelektual, sosial, sekaligus spiritual, yang sejak awal didirikan sebagai jawaban terhadap kebutuhan umat: membimbing, mendampingi, dan membebaskan masyarakat dari belenggu persoalan sosial, psikologis, dan spiritual.

Namun, gelombang transformasi pendidikan tinggi, perubahan sosial, serta derasnya pengaruh konseling modern telah mengguncang fondasi epistemologi Prodi BPI. Istilah “penyuluhan” dianggap usang, kalah populer dibanding kata “konseling” yang terdengar lebih profesional dan “marketable.” Bahkan, banyak pihak keliru mengira Prodi BPI hanyalah versi Islami dari psikologi Barat. Padahal, Prodi BPI memiliki ruh yang sangat khas, yaitu dakwah profetik. Artikel ini menunjukkan bahwa eksistensi Prodi BPI hari ini berada di persimpangan jalan. Ia harus memilih: bertahan dengan identitas dakwah profetiknya, atau larut dalam arus global konseling yang bisa membuatnya kehilangan wajah keilmuan. Persoalan BPI bukan hanya soal nama, tetapi menyangkut hakikat ilmu, masa depan lulusan, serta kontribusinya bagi umat.

Namun, di tengah tantangan itu, Prodi BPI FDIKOM UIN Syarif Hidayatullah Jakarta menjadi tonggak harapan. Akreditasi Unggul BAN-PT, pengakuan internasional dari ACQUIN, dan sejarah akreditasi AUN-QA menjadi bukti nyata bahwa Prodi BPI masih relevan, diakui, dan mampu bersaing di level nasional dan global. Tapi akreditasi saja tidak cukup. Prodi BPI harus terus mempertegas eksistensinya melalui:

- Peneguhan epistemologi dakwah profetik
- Reformulasi kurikulum integratif dan kontekstual
- Penguatan kompetensi lulusan yang profetik
- Reposisi kelembagaan yang strategis

Tanpa langkah strategis ini, Prodi BPI hanya akan menjadi nama dalam lembar SK Rektor, yang pelan-pelan kehilangan relevansi sosial maupun akademik. BPI tidak boleh sekadar ada; ia harus bermakna. Sebab masa depan dakwah Islam — salah satunya — ada di pundak Prodi BPI.

Adapun saran dalam artikel ini antara lain:

Bagi Pengelola Prodi BPI:

- Segera melakukan audit kurikulum secara komprehensif. Pastikan kurikulum Prodi BPI tidak hanya meminjam teori konseling Barat, tetapi dibangun atas kerangka dakwah profetik yang memiliki akar historis dan kontekstual.
- Susun Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang lebih spesifik. Hindari frasa umum seperti “mampu melakukan bimbingan dan konseling Islam” tanpa kejelasan ranah dan metode.
- Lakukan branding Prodi BPI melalui publikasi ilmiah, media sosial, podcast, hingga video dakwah digital agar masyarakat, calon mahasiswa, dan stakeholders memahami apa keunikan BPI dibanding prodi lain.

Bagi Dosen Prodi BPI:

- Tingkatkan literasi digital agar dapat mengajarkan mahasiswa keterampilan dakwah berbasis teknologi, seperti penyuluhan online, konten kreatif, atau konseling berbasis aplikasi.

- Aktif menghasilkan penelitian inovatif tentang penyuluhan Islam, dakwah digital, trauma healing, atau intervensi sosial berbasis nilai Islam.
- Bentuk jejaring akademik nasional dan internasional, misalnya dengan APSI, ASPIKOM, AUN-QA, ACQUIN, atau asosiasi profesi konseling. Kehadiran di forum ini bukan hanya soal eksistensi, tetapi juga peluang kolaborasi riset dan pengakuan keilmuan.

Bagi Mahasiswa BPI:

- Jangan hanya menjadi penonton. Aktiflah terjun ke lapangan melalui magang di lapas, rumah sakit, NGO, KUA, atau lembaga sosial lain. Lapangan adalah ruang belajar terbaik bagi mahasiswa BPI.
- Asah kemampuan komunikasi publik, storytelling, dan digital content creation. Dunia dakwah modern tidak lagi cukup dengan retorika lisan, tetapi harus bisa masuk ke ruang digital yang digemari generasi muda.
- Bangun portofolio karya ilmiah atau sosial agar memiliki bekal kuat ketika memasuki dunia kerja.

Bagi Pimpinan Fakultas Dakwah dan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta:

- Berikan dukungan kebijakan dan pendanaan yang kuat untuk pengembangan Prodi BPI. Ini termasuk pendanaan riset dosen, pelatihan teknologi dakwah digital, hingga modernisasi laboratorium dakwah.
- Pastikan Prodi BPI memiliki posisi strategis di internal kampus, sehingga tidak terpinggirkan oleh prodi umum yang dianggap lebih “marketable.”
- Inisiasi kerjasama kelembagaan antara Prodi BPI dan Kemenag, BKKBN, Kemenkumham, NGO, atau lembaga internasional, agar alumni BPI memiliki ruang pengabdian yang lebih luas.

Bagi Kementerian Agama dan Lembaga Kebijakan Nasional:

- Rancang kebijakan khusus yang mengakui profesi penyuluhan Islam sebagai profesi strategis nasional, dengan sertifikasi profesional dan remunerasi yang layak.
- Tegaskan nomenklatur Prodi BPI sebagai kekayaan keilmuan Islam. Jangan sampai Prodi BPI dihapus atau digabung hanya demi efisiensi birokrasi.
- Prioritaskan lulusan Prodi BPI dalam perekrutan tenaga penyuluhan agama Islam, sehingga Prodi BPI memiliki kejelasan fungsi dalam kebijakan nasional.

Catatan akhir menegaskan bahwa Prodi BPI tidak boleh berjalan di tempat. Era industri 5.0, digitalisasi, krisis sosial, dan transformasi kebijakan pendidikan tinggi menuntut Prodi BPI untuk terus berbenah. Ia harus menjadi ilmu dakwah modern yang memadukan spiritualitas, psikologi, teknologi, dan kepekaan sosial. Bukan hanya sekadar membimbing umat, tetapi juga membebaskan dan memberdayakan masyarakat menuju kehidupan yang lebih adil, damai, dan beradab. Oleh karena masa depan dakwah Islam tidak cukup hanya dengan ceramah. Ia butuh ilmu. Dan salah satu ilmunya adalah Bimbingan dan Penyuluhan Islam.



UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada rekan-rekan dosen Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, khususnya para dosen Prodi Bimbingan dan Penyuluhan Islam (BPI), yang telah memberikan banyak masukan, kritik konstruktif, serta inspirasi dalam penyusunan artikel ini. Semoga artikel ini dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan Prodi BPI sebagai ilmu dakwah yang transformatif, kontekstual, dan relevan dengan tuntutan zaman.

DAFTAR PUSTAKA

- Açıkgenç, A. (2014). *Islamic scientific tradition in history*. ISTAC–IKIM.
- Corey, G. (2013). *Theory and practice of counseling and psychotherapy* (9th ed.). Brooks/Cole.
- Egan, G. (2002). *The skilled helper: A problem-management approach to helping* (7th ed.). Wadsworth.
- Hamdan, A. (2008). Cognitive restructuring: An Islamic perspective. *Journal of Muslim Mental Health*, 3(1), 99–116.
- Jainuri, A. (2013). *Ilmu dakwah dan penyuluhan Islam*. LKiS.
- Kuhn, T. S. (1962). *The structure of scientific revolutions*. University of Chicago Press.
- Kuntowijoyo. (2006). *Islam sebagai ilmu: Epistemologi, metodologi dan etika*. Tiara Wacana.
- Mustofa, A. (2016). *Epistemologi dakwah: Membaca ulang akar keilmuan dakwah Islam*. Pustaka Pelajar.
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009.
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2016.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor.
- Pohan, R. A., & Ramadhani, E. (2018). Miskonsepsi program studi BPI/BKI Fakultas Dakwah di PTKIN. *Jurnal Kajian Konseling dan Pendidikan*, 1(2), 54–58.
- Prayitno. (2013). *Konseling integritas*. UNP Press.
- Surat Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 2293/E3/2014.